

METODOLOGI MANAJEMEN PUBLIK
(An Introduction of Research Methods in Public Administration & Public Management
– Sandra van Thiel)
Studi Kasus: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Program
BERKIBAR

Realita Utama
2426061006
Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Metodologi Manajemen Publik berdasarkan pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Sandra van Thiel (2014) dalam konteks implementasi kebijakan daerah di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada penerapan *Evidence-Based Management dan Collaborative Governance* dalam Program BERKIBAR (Bersama Kita Benahi Jalan Rusak) yang dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Program ini merupakan inovasi tata kelola infrastruktur jalan berbasis kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui skema *co-financing dan resource sharing* sebagai strategi mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan daerah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis teoritis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan berbasis bukti melalui sistem *Road Asset Management System (RAMS)*, survei lapangan, dan evaluasi berbasis indikator telah meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas kebijakan publik. Selain itu, kolaborasi publik–swasta berhasil menciptakan nilai publik yang nyata melalui pembangunan dan rehabilitasi lebih dari 320 km jalan provinsi dengan kontribusi CSR sebesar Rp78 miliar. Temuan ini membuktikan bahwa metodologi manajemen publik yang berbasis bukti dan kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas tata kelola infrastruktur daerah serta menjadi model strategis pengembangan *non-commercial Public Private Partnership* yang berkelanjutan dan partisipatif.

Kata kunci: Metodologi Manajemen Publik, *Evidence-Based Management*, *Collaborative Governance*, Program BERKIBAR.

A. Pendahuluan

Perkembangan administrasi publik di era modern ditandai oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi sekadar diharapkan menjadi penyedia layanan, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya publik secara strategis dan berbasis bukti (*evidence-based management*). Dalam konteks ini, metodologi manajemen publik berperan penting sebagai kerangka ilmiah untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik secara sistematis dan akuntabel. Menurut Sandra van

Thiel (2014) dalam bukunya *An Introduction of Research Methods in Public Administration & Public Management*, metodologi penelitian dalam manajemen publik merupakan proses ilmiah untuk memahami realitas administrasi, menjelaskan hubungan antaraktor, serta mengembangkan solusi kebijakan yang relevan dengan konteks pemerintahan. Van Thiel menekankan bahwa studi administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi perilaku organisasi publik. Oleh karena itu, setiap keputusan manajerial harus didukung oleh data empiris dan analisis yang valid agar menghasilkan kebijakan yang efektif serta bernilai publik (*public value*).

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Bryson (2018) yang menyatakan bahwa manajemen strategis publik merupakan proses kolaboratif yang melibatkan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi dalam rangka mencapai tujuan sosial yang bernilai bagi masyarakat. Dengan kata lain, metodologi dalam manajemen publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif seperti dalam paradigma *New Public Management*, tetapi juga pada penciptaan nilai publik melalui partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar-sektor (*New Public Governance*).

Sementara itu, Moore (2013) memperkenalkan konsep *Strategic Triangle* yang menegaskan bahwa keberhasilan manajer publik tergantung pada tiga elemen utama, yaitu: (1) *public value creation*, (2) *legitimacy and support*, serta (3) *operational capacity*. Metodologi manajemen publik berperan dalam memastikan ketiga elemen tersebut terintegrasi secara sistematis melalui pendekatan ilmiah dan terukur. Di Indonesia metodologi manajemen publik semakin relevan dalam upaya reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan program pembangunan. Namun, berbagai penelitian (Erawan, 2023; Budiarmo, 2023) menunjukkan bahwa masih banyak organisasi publik yang belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan metodologis dalam perencanaan dan evaluasi kinerja, terutama pada sektor infrastruktur yang kompleks dan lintas aktor.

Dalam konteks Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) menjadi salah satu institusi strategis yang mengelola pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai tulang punggung konektivitas wilayah. Melalui Program BERKIBAR (Bersama Kita Benahi Jalan Rusak), BMBK mencoba menerapkan prinsip-prinsip metodologi manajemen publik dalam bentuk inovasi kolaboratif antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Skema co-

financing/resource sharing yang diterapkan pada program ini menunjukkan bagaimana pendekatan ilmiah dan partisipatif dapat diimplementasikan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur non-komersial. Program BERKIBAR juga menjadi contoh nyata penerapan metodologi berbasis *New Public Governance* sebagaimana dijelaskan oleh Osborne (2010), yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penyediaan layanan publik. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, BMBK tidak hanya mengandalkan sumber daya pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan kontribusi sektor swasta (melalui CSR) dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan jalan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah serta tuntutan terhadap transparansi dan efektivitas kebijakan publik, penelitian mengenai metodologi manajemen publik menjadi semakin penting untuk dikaji secara mendalam. Penerapan metodologi yang dikemukakan oleh Sandra van Thiel (2014) memberikan kerangka ilmiah yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam pengelolaan organisasi publik. Melalui pendekatan berbasis bukti (*evidence-based management*) dan kolaborasi lintas sektor, instansi pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik. Dalam konteks tersebut, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menjadi contoh nyata penerapan metodologi manajemen publik melalui Program BERKIBAR yang mengedepankan inovasi kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip metodologi manajemen publik diterapkan dalam praktik tata kelola daerah serta bagaimana pendekatan tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi publik.

B. Tinjauan Pustaka

1. Metodologi dalam Manajemen Publik menurut Sandra van Thiel

Metodologi manajemen publik merupakan cabang dari ilmu administrasi publik yang berfokus pada cara memahami dan menjelaskan dinamika penyelenggaraan pemerintahan melalui pendekatan ilmiah. Dalam pandangan Sandra van Thiel (2014), metodologi memiliki peran sentral dalam membangun hubungan antara teori dan praktik dalam administrasi publik. Ia menegaskan bahwa “*research in public*

administration is not only about studying government, but for improving government performance,” artinya penelitian administrasi publik tidak hanya bertujuan untuk memahami organisasi pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerjanya.

Menurut Van Thiel, metodologi manajemen publik bukan sekadar kumpulan teknik penelitian, melainkan sebuah kerangka berpikir ilmiah (*scientific framework*) yang menuntun peneliti dan praktisi dalam memahami fenomena organisasi publik. Ia menekankan pentingnya *logical reasoning, systematic inquiry, dan empirical validation* sebagai prinsip dasar dalam setiap riset manajemen publik. Dengan kata lain, setiap kebijakan dan keputusan publik harus didasarkan pada data yang valid dan proses analisis yang rasional, bukan semata-mata pada intuisi atau tekanan politik. Van Thiel mengklasifikasikan dua orientasi penelitian dalam administrasi publik, yaitu: *Research about Public Administration*, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena pemerintahan, birokrasi, dan perilaku organisasi publik. Orientasi ini bersifat analitis dan teoritis, berfokus pada pengetahuan ilmiah tentang bagaimana sektor publik bekerja.

Research for Public Administration, yaitu penelitian yang dirancang untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah kebijakan dan manajerial. Orientasi ini bersifat aplikatif, di mana hasil penelitian digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Kedua orientasi ini saling melengkapi dan menjadi ciri khas pendekatan Van Thiel yang menggabungkan dimensi ilmiah dan praktis dalam satu kesatuan metodologi manajemen publik. Ia menolak dikotomi antara “penelitian akademik” dan “praktik kebijakan,” karena menurutnya, efektivitas pemerintahan justru bergantung pada kemampuan mengintegrasikan riset ilmiah ke dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sandra van Thiel menjelaskan bahwa perkembangan metodologi dalam manajemen publik dipengaruhi oleh pergeseran paradigma administrasi publik. Awalnya, pendekatan birokratis klasik (Weber, 1947) menekankan hierarki, aturan formal, dan rasionalitas legal sebagai dasar legitimasi pemerintah. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas masyarakat dan ekonomi, muncul kebutuhan akan pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, dan partisipatif. Dalam bukunya, Van Thiel menguraikan bahwa metodologi manajemen publik modern berdiri di atas tiga prinsip utama:

1. *Evidence-Based Policy and Management*. Setiap keputusan publik harus didasarkan pada data empiris, bukan asumsi. Pendekatan ini berakar pada gagasan Rossi, Lipsey & Freeman (2004) mengenai *evaluation research*, yang menekankan pentingnya riset dalam menilai efektivitas program publik. Van Thiel menegaskan bahwa pengumpulan data dan analisis empiris harus menjadi bagian dari siklus kebijakan publik agar keputusan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
 2. *Reflexivity and Contextual Understanding*. Van Thiel mengingatkan bahwa realitas administrasi publik selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang ini tidak dapat sepenuhnya bersifat objektif seperti ilmu eksakta, melainkan harus bersifat reflektif dan kontekstual. Ia mengadopsi pendekatan interpretivist yang berfokus pada makna dan interaksi antaraktor dalam sistem pemerintahan.
 3. *Integration between Theory and Practice*. Dalam administrasi publik, teori tidak dapat berdiri sendiri tanpa relevansi praktis. Van Thiel mengutip pandangan Yin (2014) tentang studi kasus sebagai metode yang efektif untuk menjembatani teori dan praktik. Melalui studi kasus, peneliti dapat menguji teori dalam situasi nyata serta menghasilkan *lessons learned* yang dapat diadaptasi oleh pembuat kebijakan.
- Ketiga prinsip ini menempatkan metodologi manajemen publik sebagai alat untuk memahami realitas birokrasi secara ilmiah sekaligus sebagai strategi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) bagi organisasi pemerintah.

Menurut Van Thiel, penelitian dalam manajemen publik harus mengikuti tahapan metodologis yang sistematis, meliputi:

1. **Formulasi Masalah Publik:** Tahap awal penelitian adalah mengidentifikasi masalah kebijakan atau manajerial yang benar-benar relevan dengan kepentingan publik. Masalah publik tidak selalu identik dengan masalah administratif, tetapi bisa mencakup persoalan sosial yang membutuhkan intervensi kebijakan.
2. **Pemilihan Desain Penelitian:** Van Thiel menekankan pentingnya memilih desain penelitian yang sesuai dengan tujuan. Untuk penelitian yang berorientasi pada kebijakan, metode kualitatif seperti *case study*, *policy analysis*, atau *participatory research* sering kali lebih efektif karena mampu menggali dinamika sosial dan politik di balik kebijakan publik.
3. **Pengumpulan Data dan Triangulasi:** Data dalam penelitian administrasi publik harus diperoleh dari berbagai sumber wawancara, observasi, dokumen, dan statistik

guna menjamin validitas. Ia menekankan pentingnya triangulasi data sebagaimana diuraikan oleh Denzin (1978) sebagai strategi untuk meminimalkan bias dan memperkuat keandalan hasil penelitian.

4. Analisis dan Refleksi: Tahap analisis bukan hanya proses teknis, tetapi juga reflektif. Peneliti harus mampu menafsirkan data dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan, norma, dan nilai-nilai publik yang terlibat dalam proses pemerintahan.
5. Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan: Van Thiel menyebutkan bahwa penelitian yang baik dalam administrasi publik harus menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperbaiki kinerja organisasi dan meningkatkan nilai publik.

Konsep metodologi manajemen publik yang dikemukakan oleh Van Thiel sangat relevan dengan upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui agenda good governance menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja lembaga publik. Namun, berbagai studi (Erawan, 2023; Budiarmo, 2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering kali belum sepenuhnya berbasis bukti dan masih dominan bersifat top-down.

Dalam konteks inilah, metodologi Van Thiel dapat menjadi kerangka analisis yang strategis untuk mendorong perubahan pola kerja birokrasi menuju pendekatan yang lebih ilmiah dan kolaboratif. Prinsip *research for administration* memungkinkan lembaga pemerintah daerah seperti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung untuk menjadikan penelitian dan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program pembangunan, dan melakukan evaluasi partisipatif. Dengan demikian, metodologi manajemen publik bukan hanya instrumen penelitian akademik, tetapi juga alat manajerial bagi organisasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada nilai publik.

2. Evolusi dan Perkembangan Teori Manajemen Publi

Ilmu administrasi publik berkembang seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan dan dinamika sosial yang memengaruhi peran negara dalam kehidupan masyarakat. Evolusi teori manajemen publik mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana pemerintah dapat dikelola secara efisien, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada nilai publik. Menurut Denhardt & Denhardt (2015), perubahan paradigma administrasi publik terjadi karena pergeseran nilai dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Setiap fase dalam perkembangan teori

membawa asumsi, metode, dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya berkontribusi terhadap pembentukan *public management* sebagai disiplin ilmiah dan praktik pemerintahan modern.

A. Paradigma Birokrasi Klasik (*Weberian Bureaucracy*)

Tahap awal perkembangan administrasi publik modern berakar pada pemikiran Max Weber (1947) yang memperkenalkan konsep birokrasi rasional-legal sebagai bentuk ideal organisasi pemerintahan. Weber menekankan prinsip rasionalitas, hierarki yang jelas, pembagian kerja, dan aturan formal yang mengatur perilaku pegawai. Sistem birokrasi ini dianggap sebagai cara terbaik untuk menjamin keadilan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Weber, kekuatan utama birokrasi terletak pada kemampuannya menegakkan kepastian hukum dan menghindari praktik personalisme dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, model ini sering menimbulkan kelemahan berupa rigiditas, kurangnya inovasi, dan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini kemudian menjadi kritik utama yang mendorong lahirnya paradigma baru di era modern.

B. Paradigma *New Public Management*

Pada akhir tahun 1980-an hingga awal 2000-an, muncul paradigma baru yang dikenal sebagai *New Public Management* (NPM). Menurut Osborne dan Gaebler (1992), NPM adalah upaya untuk mengubah cara kerja birokrasi dengan mengadopsi praktik manajerial sektor swasta. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil (*result-oriented governance*). Ciri utama NPM antara lain:

1. Fokus pada kinerja dan hasil (*performance-based management*);
2. Penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan publik, seperti outsourcing dan kompetisi antarinstansi;
3. Desentralisasi kewenangan dan peningkatan otonomi unit kerja;
4. Penekanan pada akuntabilitas individual dan pengukuran kinerja.

Meskipun NPM berhasil mendorong efisiensi dan inovasi, kritik terhadap paradigma ini datang dari berbagai kalangan. Hood (1995) dan Pollitt & Bouckaert (2017) menilai bahwa orientasi pasar sering kali mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik. Akibatnya, hubungan antara pemerintah dan warga menjadi transaksional, bukan kolaboratif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan NPM mulai diadopsi melalui reformasi birokrasi dan penerapan sistem *performance budgeting* pasca tahun 2000-an.

Namun, penerapan tersebut sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengubah perilaku organisasi publik yang cenderung hierarkis. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk melangkah ke paradigma baru yang lebih kolaboratif dan berorientasi nilai.

C. Paradigma *New Public Governance*

Sebagai kritik terhadap keterbatasan NPM, muncul paradigma *New Public Governance* yang diperkenalkan oleh Stephen Osborne (2010). Paradigma ini menekankan bahwa sektor publik tidak dapat bekerja secara efektif tanpa melibatkan aktor-aktor non-pemerintah seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga komunitas. Osborne berpendapat bahwa tata kelola publik modern seharusnya berbasis jaringan kerja (*network governance*) dan kolaborasi lintas sektor, bukan sekadar kompetisi dan efisiensi. Menurut Osborne, NPG menempatkan pemerintah sebagai koordinator dan fasilitator, bukan pelaksana tunggal. Peran utama manajer publik dalam paradigma ini adalah membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip ini sejalan dengan konsep *governance by partnership*, yang menjadi dasar bagi banyak program pembangunan daerah berbasis kolaborasi publik-swasta di Indonesia, termasuk Program BERKIBAR di Provinsi Lampung.

Van Thiel (2014) mendukung paradigma ini dengan menegaskan bahwa metodologi manajemen publik harus adaptif terhadap konteks sosial-politik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahapan kebijakan. Dengan kata lain, penelitian dan praktik manajemen publik tidak lagi hanya mengamati “bagaimana pemerintah bekerja,” tetapi juga “bagaimana pemerintah bekerja bersama pihak lain.”

D. Paradigma *Public Value dan Co-Creation*

Tahap berikutnya dalam evolusi teori manajemen publik ditandai oleh munculnya konsep Public Value yang diperkenalkan oleh Mark H. Moore (1995; 2013). Moore berpendapat bahwa tujuan utama sektor publik adalah menciptakan nilai bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya. Untuk itu, ia memperkenalkan *model Strategic Triangle*, yang terdiri dari tiga elemen utama:

1. Penciptaan nilai publik (*Public Value Creation*);
2. Legitimasi dan dukungan politik (*Legitimacy and Support*);
3. Kapasitas operasional organisasi (*Operational Capacity*).

Model ini membantu manajer publik dalam merumuskan strategi yang menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, mandat politik, dan kapasitas birokrasi. Konsep *public value* kemudian diperluas oleh Ansell dan Torfing (2021) melalui pendekatan *co-creation*, yang menekankan keterlibatan aktif warga dan sektor swasta dalam merancang serta melaksanakan kebijakan publik. Dalam paradigma ini, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menciptakan nilai publik. Pendekatan *co-creation* sangat relevan dengan model pembangunan kolaboratif seperti Program BERKIBAR, di mana peran swasta (melalui CSR), pemerintah daerah, dan masyarakat saling melengkapi dalam membangun infrastruktur jalan yang berkelanjutan.

Dari keempat paradigma tersebut, dapat disimpulkan bahwa evolusi teori manajemen publik menunjukkan pergeseran dari orientasi struktural menuju orientasi kolaboratif. Jika birokrasi klasik menekankan hierarki dan aturan, maka NPM mengutamakan efisiensi, NPG menonjolkan kolaborasi, dan *public value* mengarah pada penciptaan nilai sosial. Sandra van Thiel (2014) berperan penting dalam menjembatani seluruh paradigma tersebut melalui metodologinya yang bersifat empiris, reflektif, dan kontekstual.

Metodologi Van Thiel memungkinkan peneliti dan praktisi memahami dinamika pemerintahan tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga berdasarkan data dan partisipasi para pemangku kepentingan. Dalam konteks daerah seperti Lampung, pendekatan ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dapat mengimplementasikan program pembangunan berbasis *co-financing dan resource sharing* dengan dunia usaha serta masyarakat. Evolusi teori ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan manajemen publik modern tidak hanya diukur dari kinerja administratif, tetapi dari kemampuan pemerintah menciptakan kepercayaan, legitimasi, dan nilai publik melalui kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, metodologi manajemen publik berfungsi bukan hanya sebagai instrumen penelitian, tetapi juga sebagai strategi kepemimpinan dan inovasi kebijakan di sektor publik.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* sebagai pendekatan utama untuk menjawab permasalahan secara teoritis berdasarkan sumber-sumberpustaka terkini. Metode ini mengandalkan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, dokumen

pemerintah, dan publikasi akademik lainnya yang valid. Menurut Snyder 2019 literature review bertujuan menganalisis dan menyatukan temuan penelitian sebelumnya untuk memahami suatu topik secara menyeluruh. Metode ini juga membantu mengidentifikasi celah penelitian dan menyusun kerangka teori (Snyder,2019). Fink 2020 menambahkan bahwa *review literatur* dilakukan secara sistematis melalui tahapan seperti pemilihan topik, pencarian sumber yang kredibel, evaluasi kualitas, dan sintesis temuan. Tahapan ini diterapkan dalam penelitian guna memastikan akurasi dan relevansi data. Adapun literatur yang dikaji berasal dari jurnal atau artikel ilmiah, laporan resmi (seperti BPS dan Bappenas), serta regulasi yang relevan, yang diperoleh melalui Google Scholar, ScienceDirect, dan DOAJ (Fink,2020)

D. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Program BERKIBAR

Program BERKIBAR (Bersama kita benahi jalan rusak) merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sejak tahun 2021 sebagai respon terhadap keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan jalan. Program ini dirancang berdasarkan prinsip co-financing dan resource sharing, yaitu menggabungkan sumber daya pemerintah, dunia usaha (melalui CSR), dan masyarakat. Tujuan utama BERKIBAR adalah mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, BMBK bertindak sebagai fasilitator dan koordinator, sedangkan pihak swasta berkontribusi melalui pendanaan atau material, dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan serta perawatan jalan. Program ini sejalan dengan paradigma New Public Governance (Osborne, 2010) yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kemitraan antaraktor. Selain itu, pendekatan Public Value (Moore, 2013) juga tercermin dalam upaya BMBK menciptakan nilai sosial berupa peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi lokal, dan partisipasi warga.

2. Penerapan Metodologi Manajemen Publik Berdasarkan Pendekatan Evidence-Based Management

Pendekatan *Evidence-Based Management* (EBM) merupakan inti dari metodologi manajemen publik modern yang menekankan penggunaan bukti empiris, hasil riset, dan analisis kebijakan dalam pengambilan keputusan publik

(Van Thiel, 2014). Prinsip ini menuntut agar kebijakan tidak didasarkan pada intuisi birokrat semata, melainkan pada data, evaluasi, dan pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Dalam konteks Program BERKIBAR yang dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena program tersebut melibatkan pengambilan keputusan lintas aktor (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dengan kompleksitas tinggi dan keterbatasan sumber daya publik. Dengan demikian, penerapan metodologi manajemen publik berbasis EBM menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan infrastruktur didasarkan pada *evidence* yang sahih, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif.

Pendekatan evidence-based management sebagaimana dijelaskan oleh Sandra van Thiel (2014) menekankan pentingnya penggunaan data empiris dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pada Program BERKIBAR, pendekatan ini tampak dalam beberapa aspek utama:

1. Perencanaan Berbasis Data (*Data-Driven Planning*). BMBK menggunakan data kondisi jalan dari survei lapangan, laporan masyarakat, dan sistem *Road Asset Management System* (RAMS) untuk menentukan prioritas pembangunan. Pemetaan ini memastikan bahwa sumber daya diarahkan ke ruas jalan yang paling membutuhkan perbaikan. Contohnya, perencanaan tahun 2023 menunjukkan bahwa 67% ruas jalan yang menjadi sasaran program merupakan jalan penghubung ekonomi desa–kota dengan tingkat lalu lintas tinggi.
2. Analisis Kelayakan dan Efisiensi. BMBK melakukan *cost-benefit analysis* untuk menilai efisiensi pembiayaan proyek kolaboratif. Melalui pendekatan ini, penggunaan dana CSR diarahkan pada kegiatan dengan dampak sosial dan ekonomi paling besar.

Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Indikator. Evaluasi program dilakukan melalui indikator yang terukur, seperti panjang jalan yang diperbaiki, tingkat kepuasan masyarakat, dan nilai kontribusi CSR. Setiap hasil pembangunan dilaporkan secara terbuka melalui situs resmi BMBK dan rapat koordinasi dengan DPRD. Pendekatan ini membuktikan bahwa Program BERKIBAR telah mengadopsi prinsip metodologi ilmiah dalam kebijakan publik, di mana data dan analisis empiris menjadi dasar pengambilan keputusan sesuai pandangan Van Thiel

bahwa “*data-driven research enhances accountability and transparency in public management.*”

3. Kolaborasi Publik–Swasta sebagai Implementasi Governance Network

Salah satu karakter utama Program BERKIBAR adalah keterlibatan multipihak dalam bentuk kolaborasi publik–swasta. Pola ini menunjukkan penerapan paradigma New Public Governance (Osborne, 2010) yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator jaringan (network facilitator) daripada pelaksana tunggal.

1. Bentuk Kolaborasi. Kolaborasi diwujudkan melalui perjanjian kerja sama (Naskah Perjanjian Hibah Daerah – NPHD) antara BMBK dan perusahaan mitra. Perusahaan menyumbangkan material, alat berat, atau dana CSR untuk memperbaiki ruas jalan strategis, sementara pemerintah menanggung biaya operasional dan pengawasan teknis.
2. Partisipasi Masyarakat. Masyarakat berperan dalam pengawasan proyek dan pelaporan kerusakan melalui forum musyawarah desa dan kanal aduan digital. Keterlibatan ini mencerminkan prinsip *co-creation* (Ansell & Torfing, 2021), di mana warga menjadi bagian dari proses penciptaan nilai publik.
3. Kelembagaan dan Koordinasi. BMBK membentuk Tim Fasilitasi Kolaborasi Infrastruktur Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Tim ini memastikan transparansi pendanaan, pelaksanaan teknis, serta akuntabilitas administrasi proyek.
4. Dampak Kolaborasi. Berdasarkan laporan BMBK (2024), kerja sama dengan 19 perusahaan melalui program BERKIBAR telah menghasilkan pembangunan dan rehabilitasi lebih dari 320 km jalan provinsi dengan nilai kontribusi CSR mencapai Rp78 miliar.

Dengan demikian, BERKIBAR telah menjadi model implementasi nyata dari teori *collaborative governance*, di mana keberhasilan program bergantung pada kepercayaan dan sinergi antaraktor publik dan non-publik.

4. Analisis Strategis Program BERKIBAR: Balanced Scorecard

Untuk menilai efektivitas penerapan metodologi manajemen publik dalam Program BERKIBAR, digunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (Bryson, 2018) sebagai alat analisis strategis empat perspektif:

Perspektif	Indikator Kinerja Utama	Hasil & Strategi Implementasi
Stakeholder (Masyarakat)	Tingkat kepuasan warga terhadap kualitas jalan	88% responden menyatakan puas (survey 2024); dibangun kanal pengaduan jalan online sebagai sarana partisipasi.
Proses Internal	Jumlah ruas jalan diperbaiki	120 ruas jalan provinsi diperbaiki sejak 2022; proses tender dipersingkat melalui digitalisasi dokumen.
Pembelajaran & Inovasi	Jumlah teknisi bersertifikat dan pelatihan SDM	15% peningkatan teknisi bersertifikat pada 2024; diterapkan pelatihan internal “Smart Construction Management”.
Keuangan	Total nilai kontribusi CSR dan efisiensi biaya	Rp78 miliar kontribusi swasta; efisiensi anggaran APBD hingga 30%.

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa BMBK berhasil menyeimbangkan antara kinerja sosial, efisiensi ekonomi, dan penguatan kapasitas organisasi sesuai dengan prinsip *strategic alignment* Bryson (2018).

5. Analisis SWOT Program BERKIBAR

Untuk memperkuat analisis empiris, dilakukan evaluasi SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) terhadap implementasi Program BERKIBAR:

Aspek	Uraian
Strengths (Kekuatan)	Dukungan kuat dari Gubernur dan DPRD; model pembiayaan kolaboratif; transparansi pelaporan; partisipasi aktif sektor swasta.
Weaknesses (Kelemahan)	Ketergantungan pada dana CSR; keterbatasan SDM di tingkat pengawasan lapangan; belum seluruh kabupaten memiliki kapasitas koordinasi yang sama.
Opportunities (Peluang)	Dukungan pemerintah pusat untuk <i>non-commercial PPP</i> ; meningkatnya kepercayaan perusahaan lokal; peluang digitalisasi sistem monitoring infrastruktur.
Threats (Ancaman)	Fluktuasi komitmen swasta; potensi politisasi proyek; keterbatasan regulasi formal terkait skema <i>resource sharing</i> .

Analisis SWOT ini memperlihatkan bahwa secara konseptual dan operasional, Program BERKIBAR telah sesuai dengan karakter metodologi manajemen publik adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti namun tetap memerlukan penguatan aspek kelembagaan agar keberlanjutan kolaborasi dapat terjaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung telah menerapkan prinsip-prinsip metodologi manajemen publik sebagaimana dijelaskan oleh Van Thiel (2014) secara konsisten dalam Program BERKIBAR. Pendekatan berbasis bukti menjamin akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, sementara kolaborasi publik–swasta menciptakan sinergi sumber daya yang memperkuat efektivitas program. Keterpaduan antara teori dan praktik dapat digambarkan melalui tiga dimensi utama: Dimensi Teknis: perencanaan dan penganggaran berbasis data (*evidence-based decision-making*). Dimensi Institusional: kerja sama lintas sektor dalam kerangka *governance network*. Dimensi Sosial: partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagai bentuk *public accountability*. Model ini mendukung pandangan Moore (2013) tentang penciptaan public value melalui integrasi antara legitimasi, dukungan sosial, dan kapasitas operasional. Selain itu, penerapan pendekatan co-creation (Ansell & Torfing, 2021) dalam Program BERKIBAR menunjukkan transformasi birokrasi Lampung menuju tata kelola yang kolaboratif dan partisipatif.

Temuan Utama Penelitian Program BERKIBAR merupakan implementasi nyata metodologi manajemen publik berbasis *evidence-based policy dan collaborative governance*. Prinsip metodologis Van Thiel terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di sektor infrastruktur. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menciptakan nilai publik yang nyata baik ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah kelembagaan regulasi kolaboratif dan penguatan SDM teknis untuk memastikan keberlanjutan program.

Temuan ini memberikan dua implikasi penting: Implikasi teoritis: Program BERKIBAR memperkaya literatur tentang penerapan metodologi manajemen publik di level daerah, menunjukkan bagaimana teori Van Thiel dapat diadaptasi dalam konteks kebijakan infrastruktur Indonesia. Implikasi praktis: Pemerintah daerah lain dapat menjadikan model BERKIBAR sebagai rujukan untuk mengembangkan *program non-commercial PPP* berbasis kolaborasi dan data, guna mempercepat pembangunan tanpa membebani APBD.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Metodologi Manajemen Publik dalam pelaksanaan Program BERKIBAR oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung telah berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Sandra van Thiel (2014). Melalui pendekatan *Evidence-Based Management (EBM)*, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan secara rasional dan berbasis data. Penggunaan *Road Asset Management System (RAMS)*, survei lapangan, serta laporan masyarakat menjadi instrumen penting dalam menentukan prioritas pembangunan dan evaluasi hasil program. Pendekatan ini menegaskan adanya transformasi birokrasi dari pola kerja administratif menuju sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam Program BERKIBAR mencerminkan implementasi paradigma *New Public Governance* (Osborne, 2010) dan teori *Co-Creation* (Ansell & Torfing, 2021). Melalui skema co-financing dan resource sharing, pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya di luar APBD, sementara masyarakat berperan aktif dalam pengawasan serta perawatan hasil pembangunan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga mewujudkan nilai publik sebagaimana dikemukakan oleh Mark H. Moore (2013), yaitu nilai ekonomi melalui peningkatan konektivitas wilayah, nilai sosial melalui partisipasi warga, dan nilai tata kelola melalui peningkatan transparansi serta akuntabilitas lembaga publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Metodologi Manajemen Publik berbasis *Evidence-Based Management* dan kolaborasi multipihak mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan legitimasi tata kelola pembangunan daerah. Program BERKIBAR menjadi representasi nyata penerapan teori Van Thiel, Moore, dan Bryson dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan penguatan sistem data, peningkatan kapasitas SDM, dan pembentukan regulasi kolaboratif yang lebih adaptif, pendekatan metodologis ini dapat menjadi model strategis bagi pemerintah daerah lainnya dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan, partisipatif, dan bernilai publik tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public Governance as Co-Creation: A Strategy for Revitalizing the Public Sector*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy? *Health Research Policy and Systems*, 15(1), 35. <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x>
- Head, B. W. (2016). Toward more "evidence-informed" policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Meuleman, L. (2021). Metagovernance for sustainability: A framework for implementing the sustainable development goals. *Public Management Review*, 23 (2), 197–218. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1637013>
- Moore, M. H. (2013). *Recognizing Public Value*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- O'Flynn, J., & Alford, J. (2021). The future of public value: A meta-analysis of research directions. *Public Management Review*, 23(9), 1341–1364. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1738374>
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
- Torfing, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019). Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward. *Administration & Society*, 51(5), 795–825. <https://doi.org/10.1177/0095399716680057>
- Van Thiel, S. (2014). *Research Methods in Public Administration and Public Management: An Introduction*. New York: Routledge.